

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib diaudit oleh BPK (Ketut, 2009).

Hal tersebut seiring dengan fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Menurut Mardiasmo (2006) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sedangkan salah satu wujud dari keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah yaitu dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas. Karena Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting yang akan digunakan oleh banyak pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pihak tersebut antara lain masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah (PP 71 Tahun 2010).

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang berkualitas. Menurut Suwardjono (2005), nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Untuk mendorong ketertiban pengelolaan laporan, sehingga nantinya penerapan tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas kesiapan personel petugas yang berkompentensi dan Sistim Pengendalian Intern serta dukungan teknologi agar dipertimbangkan secara seksama karena faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan diantaranya adalah kompetensi dari Pejabat Penatausahaan keuangan, Sistim pengendalian Intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. Karena untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, dan memenuhi kualitas seperti yang disyaratkan maka penyusunan laporan keuangan harus dilakukan oleh personel yang handal dan memiliki kompetensi yang cukup di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007). Karena kemampuan teknis sangat dibutuhkan terutama yang bertugas mengelola keuangan untuk mendukung kelancaran tugas sehingga kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dipilih sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Selain itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik dan efektif.

Menurut *GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001* (dalam Harifan, 2009) pelaksana akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan pada akhir periode akuntansi PPK-SKPD tersebut menyusun laporan keuangan untuk SKPD bersangkutan. Agar informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan ini

tidak menyesatkan pemakai, maka pihak penyedia informasi dalam hal ini adalah PPK-SKPD harus memiliki kompetensi yang cukup dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kompetensi yang memadai oleh para pelaksana akuntansi, maka kualitas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan akan semakin membaik sehingga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang tepat. Untuk itu dibutuhkan pegawai-pegawai yang berkompeten dibidangnya agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.

Hal kedua yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Permendagri 13 Tahun 2006 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Perubahan tersebut membutuhkan dukungan sistem teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al* (1991) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Dalam penjelasan PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Mustafa, 2011).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana Pengaruh Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistim pengendalian intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini terdorong juga karena adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu tentang kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan. Menurut penelitian Desi Indriasari (2008) dan Dita Arfianti (2011) menemukan bukti empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil penelitian Hazrita (2014) mengatakan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas Pertanggungjawaban laporan keuangan. Sementara hasil penelitian Harifan (2009), Andriani (2010), Rahman (2012) dan Yuliarta (2013) mengatakan bahwa Kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan.

Penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengambil objek penelitian semua SKPD yang ada di Pesisir Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasari atas adanya permasalahan-permasalahan dan fenomena yang ada di Pesisir Selatan, yaitu fakta dilapangan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten yang sangat concern dalam hal pengelolaan keuangan daerah, hal ini terbukti dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam dua tahun terakhir. Walaupun opini yang diperoleh belum WTP murni yaitu dengan paragraph penjelasan pemberian opini audit oleh BPK atas LKPD ini dapat dimaknai sebagai hal yang sangat penting, karena selain menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan tentang keseriusan dalam

pengelolaan keuangan juga mendukung transparansi keuangan, dan akuntabilitas keuangan juga untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, kelemahan struktur pengendalian intern, kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Tabel berikut ini menyajikan capaian opini BPK pada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 1.
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
untuk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009-2014

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2009	Wajar Dengan Pengecualian	BPK menemukan kelemahan sistim pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah
2010	Wajar Dengan Pengecualian	
2011	Wajar Dengan Pengecualian	
2012	Wajar Dengan Pengecualian	
2013	Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan	
2014	Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan	

Sumber : www.pesisirselatankab.go.id/file/kategori/opini-bpk/22

Fakta kedua yaitu profesionalisme masih rendah, ini dapat dilihat dengan ditemukannya hanya 19 % Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) - SKPD yang

berlatar belakang pendidikan akuntansi. Sehingga tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola keuangan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam laporannya BPK menemukan bahwa masih banyak SKPD yang menyampaikan laporan keuangan belum tepat pada waktunya dan menyampaikan laporan keuangan tidak lengkap. Ini berarti bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dari personel pengelola keuangannya maupun sistim pengendalian internnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul penelitian adalah: “ Pengaruh kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistim pengendalian intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan?

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji apakah kompetensi Pejabat penatausahaan Keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menguji apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

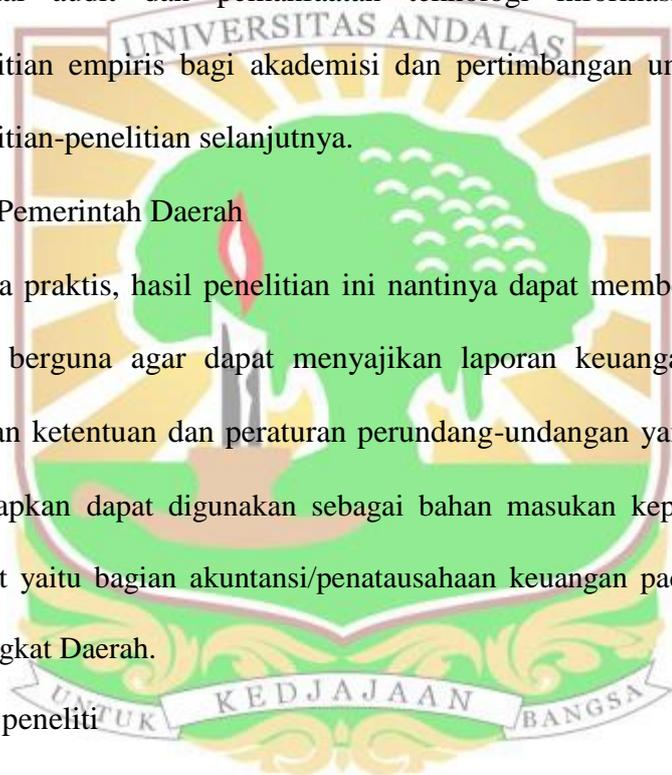
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian intern atau internal audit dan pemanfaatan teknologi informasi dan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak yang terkait yaitu bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Bagi peneliti

Bagi peneliti sendiri hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan memperdalam ilmu pengetahuan dan memberikan bukti empiris dari pengaruh faktor-faktor yang diteliti terhadap kualitas laporan keuangan dan dalam implementasinya. Juga untuk meningkatkan pemahaman kepada peneliti mengenai proses dan tantangan dalam implementasi.



1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian ini diantaranya tentang teori keagenan , teori kegunaan informasi, kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistim pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi keuangan, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang jenis dan variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas, metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian yaitu dimulai dari Profil Kabupaten Pesisir Selatan, profil responden penelitian, kemudian analisis data penelitian, Uji Validitas dan

Reliabilitas, Sebaran Instrumen Penelitian, Uji Asumsi Klasik,
Pengujian Hipotesis, dan Pembahasannya

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

